RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

2022

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.1.1 Pengertian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan untuk digunakan sebagai pedoman dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir, dan Penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2022 ini disusun dengan memperhatikan dokumen – dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta memperhatikan sinkronisasi dengan Perencanaan ditingkat Provinsi Jawa Timur dan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat.

I.2. Landasan Hukum

I.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi antara lain :

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut gambaran struktur organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya berdasarkan Perwali no 83 Tahun 2021 sesuai gambar 1.

Gambar 1

Stuktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya

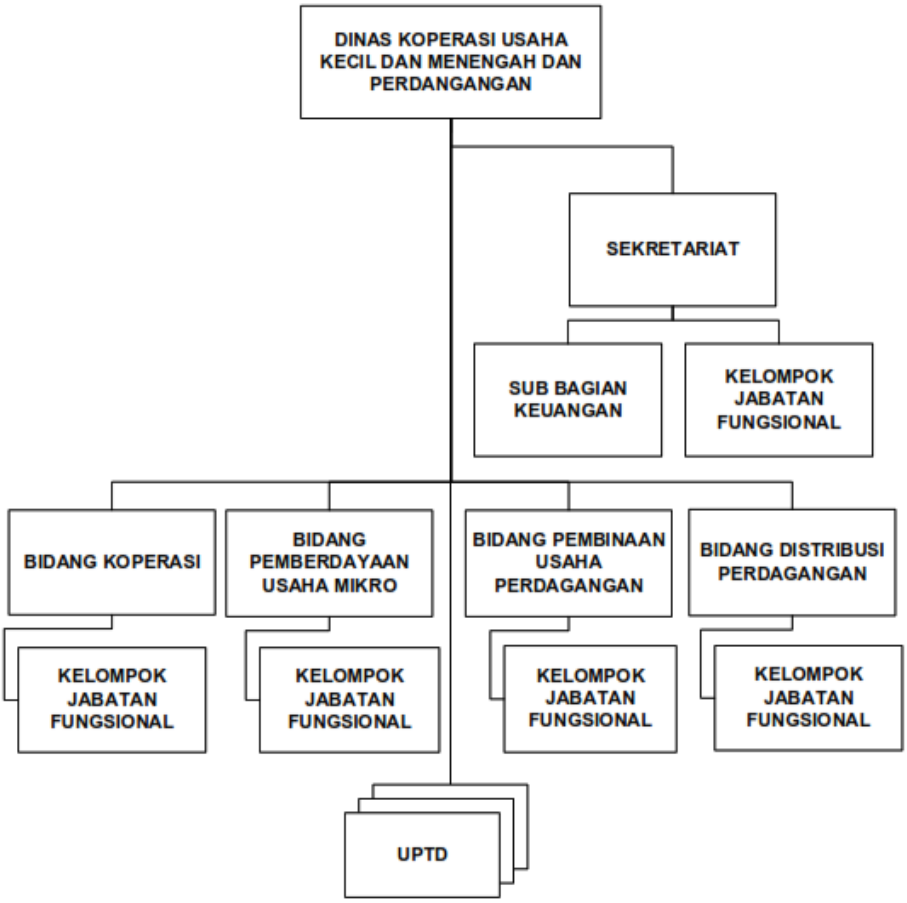

I.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan Pembangunan

Peraturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

11. Surat Keputusan Lembaga Administrasi Nasional (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

I.2.3 Ketentuan tentang Penganggaran

Peraturan yang menjadi pedoman dalam penganggaran antara lain yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

I.3.1 Ketentuan Tentang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Peraturan yang menjadi pedoman dalam Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan antara lain yaitu :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.

I.3. Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2022 disusun dengan maksud :

a. Menetapkan rencana kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya jangka pendek 1 (satu) tahun yakni tahun anggaran 2022.
b. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya dengan mengacu kepada dokumen perencanaan, memperhatikan permasalahan yang ada, dan isu-isu

strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya dalam pembangunan daerah.

c. Mengintegrasikan dokumen - dokumen perencanaan pembangunan kota dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, aspirasi masyarakat serta memperhatikan hasil evaluasi kinerja tahun lalu.

I.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tujuan disusunnya Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2022 adalah :

a. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya;
b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya dalam jangka 1 (satu) tahun;
c. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan pembangunan untuk mendukung pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan di Kota Surabaya

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2022 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud dan Tujuan

I.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

II.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telahan terhadap Kebijakan Nasional

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU TAHUN 2021

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas tahun 2021 dilaksanakan dalam 13 (tiga belas) program meliputi :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

1.1. Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

2.1. Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan : Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

3.1. Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan : Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

3.2. Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan : Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

4.1. Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

5.1. Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Sub kegiatan : Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro

5.2. Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Sub kegiatan : Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

6. Program Pengembangan UMKM

6.1. Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil

Sub kegiatan : Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi"

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

7.1. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINKOP)

7.2. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINKOP)

7.3. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DISDAG)

7.4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DISDAG)

8. Program Perekonomian Dan Pembangunan

8.1 Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Sub kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (DISDAG)

8.2 Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Sub kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (DINKOP)

9. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

10.1. Kegiatan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

Sub kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

10.2. Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Gudang

Sub kegiatan : Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang

10.3. Kegiatan : Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri

Sub kegiatan : Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik

10.4. Kegiatan : Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri

Sub kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri

10.5. Kegiatan : Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat

Sub kegiatan : Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C

10. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

10.1. Kegiatan : Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Sub kegiatan : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

11. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

11.1 Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Sub kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

11.2 Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Sub kegiatan : Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

12. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

12.1 Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Sub kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang

12.2 Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Sub kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang

12.3 Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Sub kegiatan : Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

13. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

13.1 Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sub kegiatan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

13.2 Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sub kegiatan : Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya yaitu :

a. Dari dalam (internal) : (i) Proses penentuan kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi, (ii) Belum optimalnya pengolahan data dan informasi tentang perkoperasian usaha kecil dan menengah dan perdagangan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan kebijakan, (iii) Terbatasnya Sumber Daya manusia yang memiliki pengetahuan perkoperasian usaha kecil dan menengah dan perdagangan secara mumpuni dan (iv) masih minimnya sarana prasarana penunjang kegiatan.
b. Dari luar (eksternal) : Kurangnya minat masyarakat terhadap kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan koperasi usaha kecil dan menengah dan perdagangan yakni kegiatan pembinaan dan pelatihan di bidang perkoperasian

usaha kecil dan menengah dan perdagangan. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk tertib serta kepatuhan terhadap peraturan, kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tera/tera ulang, minimnya akses informasi peluang ekspor produk, kurangnya kemampuan pelaku usaha mikro untuk memenuhi standar/kriteria produk sesuai pasar.

Untuk menunjang keberhasilan diperlukan upaya-upaya peningkatan kinerja dan komitmen semua pihak serta keterlibatan seluruh komponen masyarakat, yaitu :

a. Konsisten terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sesuai prioritas kegiatan riil koperasi usaha kecil dan menengah dan perdagangan sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai.
b. Pengelolaan / pemutakiran data dan informasi tentang perkoperasian usaha kecil dan menengah dan perdagangan se-riil mungkin, agar pengambilan keputusan / kebijakan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
c. Pemanfaatan sumber daya yang ada se-optimal mungkin, dengan terus meningkatkan pengetahuan tentang perkoperasian usaha kecil dan menengah dan perdagangan.
d. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia se-optimal mungkin.
e. Peningkatan minat masyarakat dengan melakukan pendampingan secara langsung, memonitor dan mengevaluasi perkembangannya serta memberikan informasi yang dapat diterima akan manfaat kegiatan – kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan bagi masyarakat.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam Tabel T-C.29. Sedangkan realisasi hasil pelaksanaan program kegiatan

Tahun 2021 dapat diuraikan berdasarkan hasil / keluaran beserta targetnya dalam tabel T-C.29 dengan rincian laporan kinerja Perangkat Daerah dengan pokok-pokok materi antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang **tidak memenuhi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Perekonomian Dan Pembangunan (DISDAG) dengan indikator Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran. Target indikator tersebut adalah 88% dan telah terealisasi sebesar 85,40% sehingga capaian kinerja sebesar 97,05%.
2. Realisasi program/kegiatan yang **telah memenuhi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   a. Program :

No	Program	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%
2	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100%

   b. Kegiatan :

No	Kegiatan	Capaian
1	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Subkegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINKOP)	100,00%
2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Subkegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DISDAG)	100,00%
3	Kegiatan : Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Subkegiatan : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100,00%
4	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Subkegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,00%
5	Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00%

No	Kegiatan	Capaian
6	Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Subkegiatan : Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00%
7	Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Subkegiatan : Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00%
8	Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Subkegiatan : Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	100,00%
9	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Subkegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DISDAG)	100,00%
10	Kegiatan : Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri Subkegiatan : Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	100,00%
11	Kegiatan : Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri Subkegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	100,00%
12	Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Subkegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100,00%
13	Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Subkegiatan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100,00%
14	Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Subkegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	100,00%
15	Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Subkegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100,00%
16	Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Subkegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100,00%

3. Realisasi program/kegiatan yang **melebihi target** kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Program :

No	Program	Capaian
1	Program Pengembangan UMKM	107.29%
2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	122.35%
		117.34%
3	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	109.61%
4	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	100.03%
5	Program Perekonomian Dan Pembangunan	103.31%
6	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	111.76%
7	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	176.77%
		110.8%

b. Kegiatan :

No	Kegiatan	Capaian
1	Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	117,98%
2	Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan : Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	101,00%
3	Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Subkegiatan : Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	105,17%
4	Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Subkegiatan : Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	102,08%
5	Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil Subkegiatan : Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	103,11%
6	Kegiatan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Subkegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat,	107,35

No	Kegiatan	Capaian
	Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
7	Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Gudang Subkegiatan : Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	102,25%
8	Kegiatan : Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat Subkegiatan : Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	105,11%
9	Kegiatan : Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Subkegiatan : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	128,33%
10	Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Subkegiatan : Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	133,66%
11	Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Subkegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	102,42%
12	Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Subkegiatan : Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	104,11%
13	Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Subkegiatan : Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	175,49%

4. Faktor-faktor pendorong, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

No	Terpenuhinya Target	Melebihi Target
1	**Program**	
	Penerapan kebijakan untuk memantapkan dan lebih mendorong optimalisasi sumber daya yang ada pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya.	- Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan intensif - Ketepatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program
2	**Kegiatan**	
	Penyebarluasan informasi kegiatan sosialisasi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan kepada masyarakat	meningkatkan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengakses/mendapatkan sumber daya produktif (bahan baku, informasi harga bahan pokok dan penting lainnya)

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Kerja Perangkat Daerah;

   Memperhatikan pencapaian target Program yang sebagian besar telah terpenuhi bahkan melebihi target, maka diharapkan pengambilan kebijakan dan penyediaan anggaran dapat mendorong pelaksanaan kegiatan dengan melakukan berbagai inovasi, sehingga kedepan perkembangan ekonomi serta kegiatan perkoperasian, usaha kecil dan menengah dan perdagangan menjadi lebih baik serta mampu tampil dan bersaing tidak hanya di tingkat lokal tetapi nasional bahkan internasional.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Dari hasil perencanaan dan penganggaran yang perlu dilaksanakan adalah mempunyai suatu perencanaan baik jangka menengah maupun jangka panjang untuk menjawab kegiatan yang berkembang dalam era digitalisasi saat ini, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan telah mempunyai inovasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 antara lain :

   i. Memberdayakan dan mengembangkan toko kelontong dan Sentra Kuliner secara online baik dalam hal promosi (website dinas)

   ii. Membuat/memperbarui dan mengembangkan media komunikasi informasi melalui pengembangan IT terkait sosialisasi, promosi dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan.

   iii. Membuat media komunikasi dan informasi yang dipublikasikan melalui pemanfaatan media sosial / IT, sosialisasi di pusat-pusat wisata / lokasi

strategis untuk mempromosikan produk – produk usaha kecil dan menengah.

iv. Bekerjasama dengan lembaga-lemba pariwisata di tingkat Kota maupun di Jawa Timur untuk mempromosikan berbagai produk usaha kecil dan menengah yang ada.

v. Mengembangkan teknologi informasi untuk pengendalian jaringan distribusi serta monitoring ketersediaan barang yang dapat memenuhi permintaan pasar (e-peken).

vi. Mengembangkan kompetensi pelaku koperasi dan usaha kecil dan menengah melalui lembaga peningkatan kompetensi

vii. Monitoring dan evaluasi secara periodik untuk secara lebih cepat dapat mengambil kebijakan.

Tabel 2.1 (Tabel T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**									
3.3	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**									
3.30.02	**Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan**									
		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup perdagangan		**93.41%**	**80%**	**97.90%**	**122.37%**			
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	*Jumlah ijin bidang perdagangan yang diterbitkan*		591.00 berkas	340 Berkas	284.00 Berkas	83.53%			
3.30.02.2.05.01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	*Jumlah usaha di bidang perdagangan yang diawasi perijinannya*		1,608.00 Lembaga	352 Lembaga	283.00 Lembaga	80.40%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah ijin bidang perdagangan yang diterbitkan*		591.00 berkas	55 Berkas	41.00 Berkas	74.55%			
3.30.02.2.04.02	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	*Jumlah ijin bidang perdagangan yang diterbitkan*		591.00 berkas	5 Berkas	4.00 Berkas	80.00%			
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	*Jumlah usaha di bidang perdagangan yang diawasi perijinannya*		1,608.00 Lembaga	1200 Lembaga	976.00 Lembaga	81.33%			
3.30.04	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**									
		Frekuensi intervensi ketersediaan komoditas		**45 kali per kejadian**	**31 kali per kejadian**	**47.33 kali per kejadian**	**152.69%**			
		Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar		**83.50%**	**85%**	**82.91%**	**97.54%**			
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan*		307.00 kali	205 Kali	175.00 Kali	85.37%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan*		307.00 kali	205 Kali	175.00 Kali	85.37%			
3.30.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**									
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran		**86.07%**	**88%**	**86.56%**	**98.36%**			
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**			
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%		100%	100.00%	100.00%	100%		
3.30.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100.00%	100%	73.68%	73.68%	100%		
3.30.06	**Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen**									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti		**100%**	**90%**	**100%**	**111.11%**			
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	*Jumlah alat UTTP yang dilayani*		21,560.00 unit	24570 Unit	19,587.00 Unit	79.72%			
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	*Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi Legal yang dipelihara dan disediakan*		16.00 Jenis	16 Jenis	16.00 Jenis	100.00%			
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	*Jumlah alat UTTP yang diawasi*	4.750 unit	4,716.00 unit	4500 Unit	3,740.00 Unit	83.11%	4.750 unit		
3.30.03	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**									
		Frekuensi fasilitasi pelaku distribusi perdagangan		**20 kali**	**17 kali**	**19 kali**	**111.76%**			
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah gudang yang dimonitor*		475.00 lokasi	300 Lokasi	359.00 Lokasi	119.67%			
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Pelaku Distribusi Perdagangan yang dibina*		31.00 Kelompok	31 Kelompok	31.00 Kelompok	100.00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.07	**Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**									
		Persentase usaha mikro binaan yang mendapatkan fasilitasi pemasaran produk		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**			
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Sentra dan Stand Usaha Mikro yang dikelola*			15 Lokasi	15.00 Lokasi	125.00%			
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah UKM Yang Terfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro*		480.00 Orang	820 orang	844.00 orang	255.76%			
4	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**									
4.01	**Sekretariat Daerah**									
4.01.03	**Program Perekonomian Dan Pembangunan**									
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran		**86.07%**	**88%**	**86.56%**	**98.36%**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100.00%	100%	81.48%	81.48%	100%		
2	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**									
2.17	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**									
2.17.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**									
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran		**89.87%**	**88%**	**91.93%**	**104.47%**			
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**			
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%		100%	100.00%	100.00%	100%		
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana*	100%	100.00%	100%	84.62%	84.62%	100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		perkantoran								
2.17.02	**Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**									
		Persentase koperasi berklasifikasi AAB		**72.18%**	**72.95%**	**72.97%**	**100.03%**			
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi pembentukan dan peningkatan kualitas koperasi*		44.00 kelompok	50 kelompok	45.00 kelompok	90.00%			
2.17.06	**Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**									
		Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya		**55.61%**	**55.72%**	**51.97%**	**64.96%**			
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan	*Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bisnis*		100.00 koperasi	100 koperasi	45.00 koperasi	25.71%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kabupaten/Kota									
2.17.03	**Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**									
		Persentase koperasi berklasifikasi AAB		**72.18%**	**72.95%**	**72.97%**	**100.03%**			
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan*			629 koperasi	597.00 koperasi	94.91%			
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah koperasi yang dinilai kinerjanya*		35.00 koperasi	35 koperasi	35.00 koperasi	100.00%			
2.17.07	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)**									
		Persentase sentra usaha makanan dan minuman yang beroperasi secara optimal		**69.39%**	**63%**	**72.92%**	**115.74%**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase pelaku usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan		**8.97%**	**8.50%**	**9.14%**	**107.53%**			
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	*Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan*		173.00 orang/kelompok	175 orang	125.00 orang	71.43%			
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah sentra usaha yang difasilitasi*		23.00 sentra usaha	58 sentra usaha	61.00 sentra usaha	101.67%			
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah sentra usaha yang pelaku usahanya mendapatkan pembinaan*		49.00 sentra usaha	48 sentra usaha	49.00 sentra usaha	100.00%			
2.17.08	**Program Pengembangan Umkm**									
		Persentase pelaku usaha mikro yang produknya layak diujimutukan		**36.12%**	**40%**	**30.26%**	**75.65%**			
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	*Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pembinaan*		587.00 orang	707 orang	729.00 orang	84.97%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.05	**Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**									
		Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya		**55.61%**	**55.72%**	**51.97%**	**64.96%**			
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	*Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan UKM*		210.00 Orang	178 orang	210.00 orang	117.98%			
4	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**									
4.01	**Sekretariat Daerah**									
4.01.03	**Program Perekonomian Dan Pembangunan**									
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran		**89.87%**	**88%**	**91.93%**	**104.47%**			
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100.00%	100%	96.43%	96.43%	100%		

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam evaluasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Dinas dituntut untuk selalu berkembang dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme. Pengolahan data dalam jumlah banyak, serta adanya perubahan yang bersifat rutin dan berulang–ulang, sering menimbulkan kesulitan dalam penyediaan informasi.

Sesuai dengan Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pada pasal 1 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”, oleh karenanya koperasi juga bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Dinas dalam hal ini sebagai Pembina Urusan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai layanan kedinasan berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundangan yang ada, meliputi :

a. Surat keterangan pengurus dan pengawas koperasi
b. Ijin usaha simpan pinjam
c. Pelayanan pemakaian stand sentra makanan dan minuman

Kinerja pelayanan Dinas Tahun 2021 dapat dilihat melalui aplikasi Surabaya Single Window (SSW) untuk mempermudah pelayanan pada masyarakat, karena dalam pemanfaatan teknologi informasi sangat penting di era moderenisasi saat ini. Pemanfaatan teknologi informasi digunakan secara bijak oleh karena itu, Dinas dituntut untuk selalu berkembang dan meningkatkan kualitas profesionalisme didalam pelayanan, termasuk koperasi dan usaha mikro yang tergabung di layanan SSW.

Gambar 1

Jumlah Pelayanan Perijinan SSW

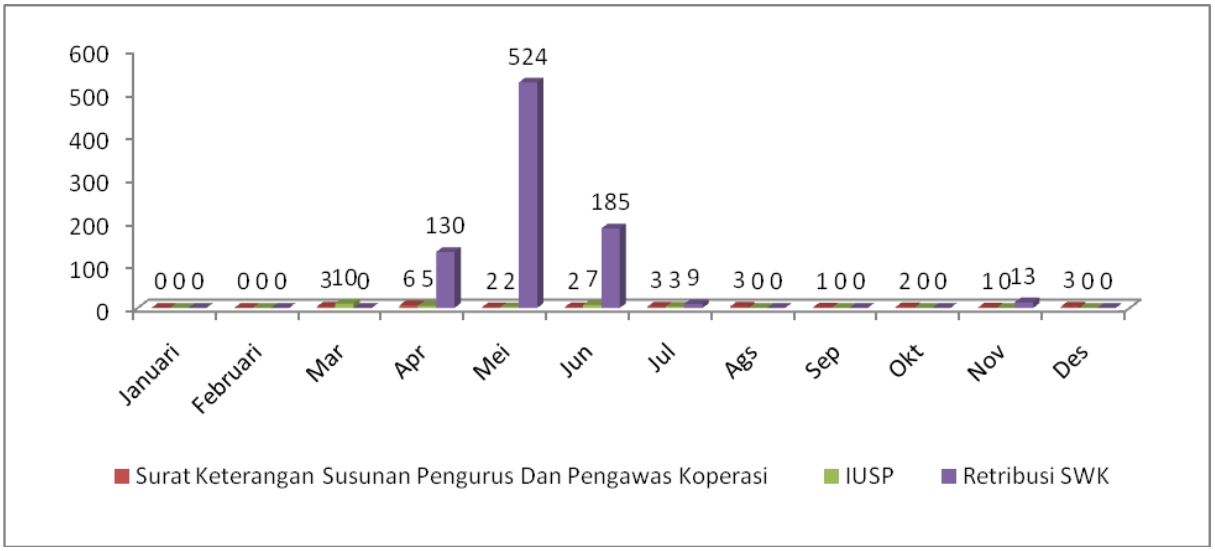

Dengan adanya Surabaya Single Window, diharapkan kemudahan dan ketepatan layanan perijinan, sehingga warga kota yang ingin mendapatkan layanan bisa mengakses dengan cepat dan mudah.

Kinerja Pelayanan Dinas yang dicapai pada tahun 2021 sesuai rincian dari masing-masing unit kerja sebagai berikut :

II.2.1 Bidang Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi, banyaknya koperasi yang ada di kota Surabaya tentunya diperlukan suatu data yang akurat dan bisa menjadi rujukan bagi pengambilan kebijakan. Pendataan koperasi dilakukan untuk mengetahui keberadaan jumlah koperasi yang ada di Kota Surabaya, jumlah Koperasi di Kota Surabaya tahun 2021 dimana tercatat terdapat 1.834 Koperasi.

Gambar 2
Status Koperasi

Dari seluruh Koperasi tersebut ada koperasi aktif sebanyak 1.571 dan banyak pula koperasi yang tidak aktif yakni 263 koperasi, Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat. Koperasi juga terbagi ke dalam beberapa jenis, dimana jenis koperasi

tersebut dibedakan berdasarkan beberapa faktor. Diantaranya faktor jenis usaha, tingkatan, status anggota dan fungsinya.

Gambar 3
Kelompok / Jenis Koperasi di Kota Surabaya

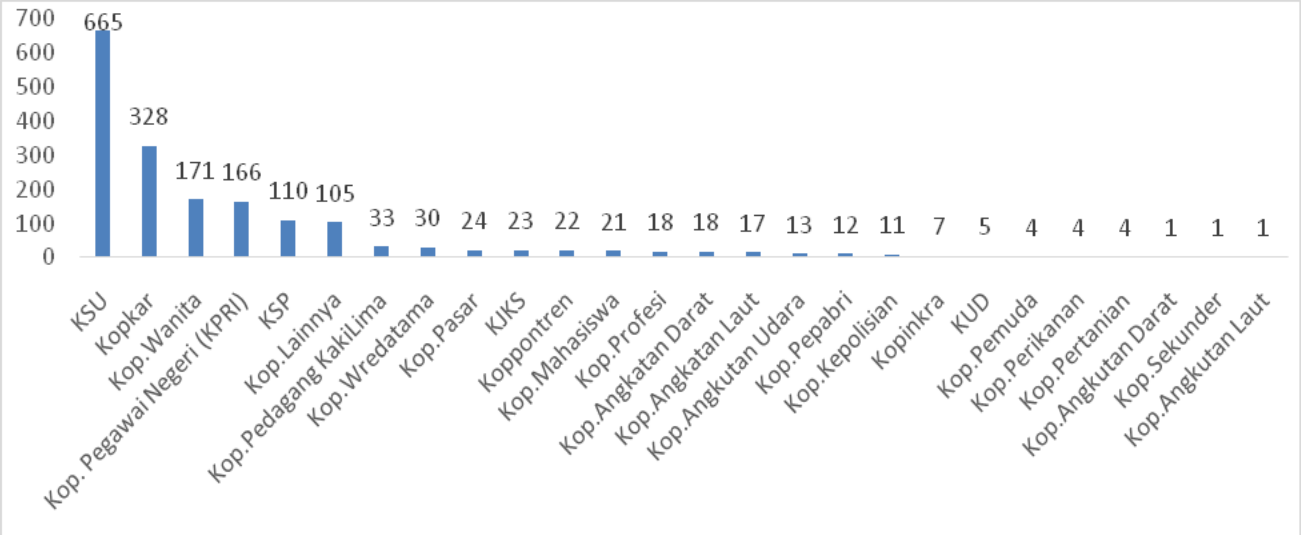

Gambar diatas menunjukkan persebaran jenis koperasi yang menjadi binaan Dinas. Banyaknya persebaran koperasi di Kota Surabaya membantu masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan sehari hari baik itu simpan pinjam maupun usaha lainnya terutama koperasi yang mempunyai usaha toko. Dari koperasi yang ada terdapat usaha yang diharapkan meningkat dari segi aset maupun volume usahanya, yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan baik koperasi pada umumnya dan anggota pada khususnya.

Hasil perkembangan untuk data RAT (Rapat Akhir Tahun) koperasi yang menjadi binaan Pemerintah Kota untuk koperasi yang melaksanakan RAT, terdapat beberapa koperasi yang tidak melaksanakan RAT karena kondisi pandemik dan larangan berkumpul terkait dengan protokol kesehatan pencegahan penularan penyakit Covid-19. Sebagai apresiasi bagi yang melaksanakan RAT, maka akan

dilakukan pengawasan secara berkala dan diikutkan dalam pendidikan dan pelatihan agar para pengurus koperasi lebih berkompeten dan profesional dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengurus / pengawas.

Kehadiran dari koperasi ini berupaya untuk bisa menjaga sikap kekeluargaan yang ada melalui asas kekeluargaan yang dimiliki oleh koperasi. Tentunya keberadaan koperasi akan bersaing dengan usaha-usaha lainnya yang saat ini semakin terlihat jelas kemajuannya. Sehingga koperasi pun menjadi penting untuk selalu diperhatikan di dalam pengelolaannya agar tetap bisa bergerak maju dan menjadi sarana pendidikan untuk masyarakat. Di mana diketahui melalui sejarah perkembangan koperasi di Indonesia yang sangat panjang, tentu tidak mudah bagi koperasi untuk tenggelam begitu saja di tengah kemajuan zaman. Perkembangan koperasi di Kota Surabaya meningkat dengan banyaknya anggota, di bawah di gambarkan perkembangan koperasi 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Gambar 4
Perkembangan Jumlah Koperasi

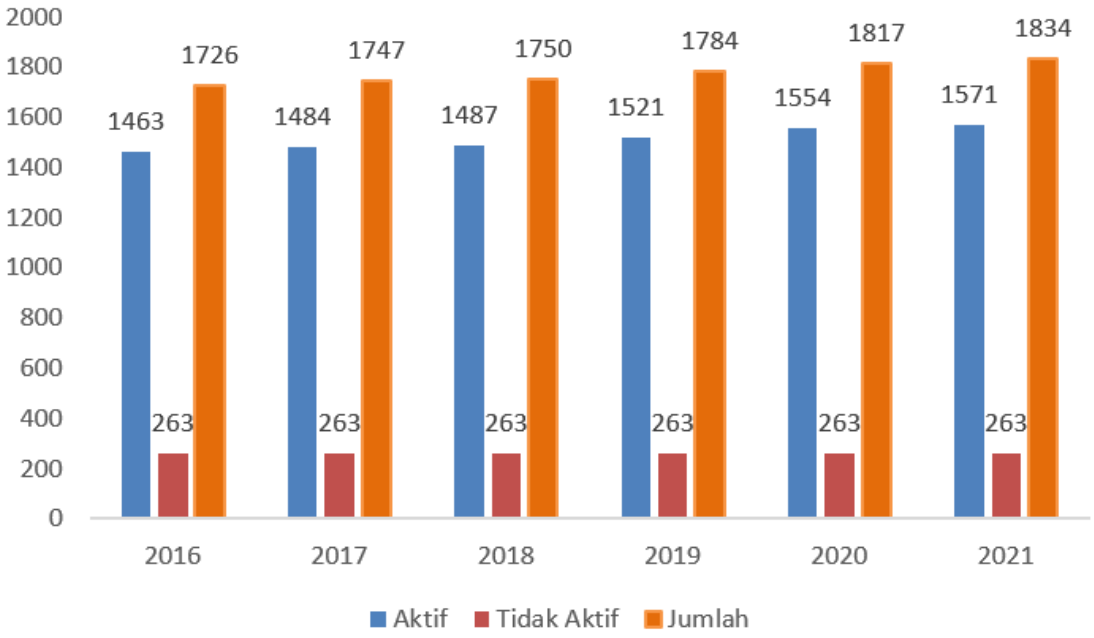

Dalam usahanya koperasi tidak terlepas dari jasa maupun keuntungan baik koperasi itu sendiri maupun sebagai timbal balik peran aktif dari anggota terhadap perkembangan usaha koperasinya, dibawah perkembangan aset dan volume usaha.

Gambar 5
Perkembangan Aset dan Volume Usaha Koperasi

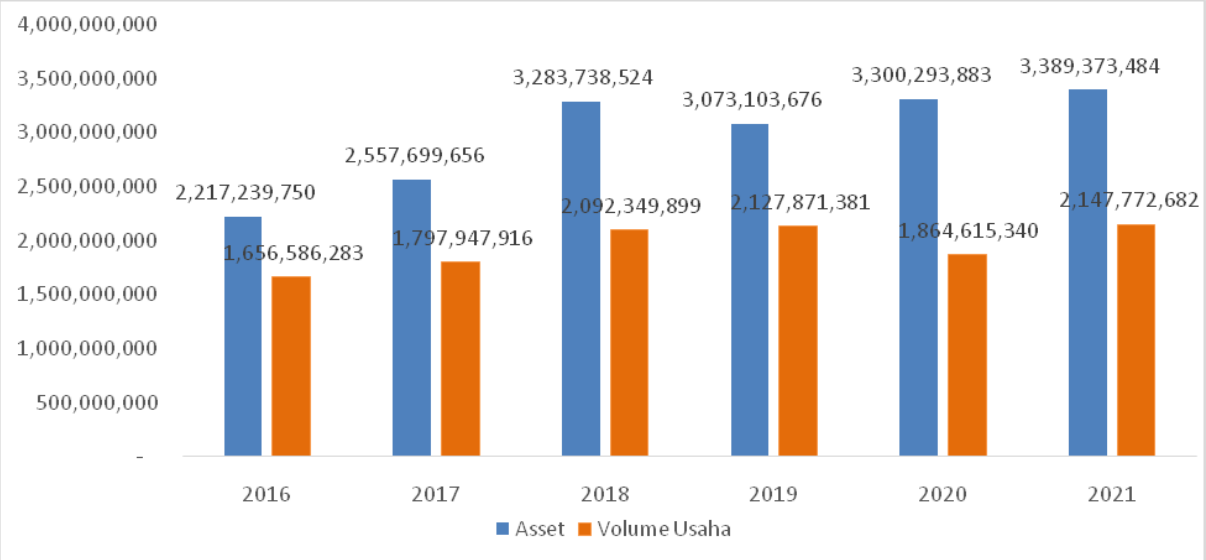

Upaya Dinas untuk meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro di masyarakat dilakukan dengan mengembangkan sistem Koperasi Toko Kelontong, yang beranggotakan warga / masyarakat yang mempunyai kegiatan usaha toko kelontong. Dengan bergabungnya warga menjadi anggota Koperasi Toko Kelontong tersebut diharapkan harga barang-barang lebih terjangkau, kegiatan usaha lebih berkembang dan keuntungan bisa terbagi dengan sesama anggota. Toko kelontong (Tokel) yang tersebar antara lain : (i), Toko Kelontong Rusunawa, (ii) Toko Kelontong Area Permukiman (eks lokalisasi), (iii) Toko Kelontong Kecamatan.

Gambar 6
Toko Kelontong Rusunawa

Koperasi Toko Kelontong tahun 2021 yang mempunyai badan hukum dan berjalan usahanya terdiri dari 7 (tujuh) koperasi toko kelontong rumah susun dan 3 (tiga) koperasi di area permukiman (eks lokalisasi) dengan data sebagai berikut :

A. Koperasi Toko Kelontong Rumah Susun

1. Barokah Rusun Tanah Merah
2. Koperasi Konsumen Rusun Randu Sejahtera
3. Koperasi Konsumen Guyub Rukun Saekoproyo
4. Koperasi Konsumen Sukses Makmur Wonorejo
5. Syariah Almuhajirin Siwalankerto Sejahtera
6. Koperasi Konsumen Cahaya Rusun Bandarejo
7. Koperasi Konsumen Guyub Maju Bersama

B. Koperasi Toko Kelontong di Area Permukiman (Eks Lokalisasi)

1. Koperasi Jasa Kampung Anggrek
2. Koperasi Konsumen Kremil Bersatu Sejahtera
3. Koperasi Mampu Jaya (eks lokalisasi Dolly)

Adapun untuk koperasi toko kelontong rumah susun yang belum berbadan hukum yaitu :

1. Pra Koperasi Rusun Romokalisari
2. Pra Koperasi Rusun Sombo

Untuk Koperasi Toko Kelontong Kecamatan, pada tahun 2021 telah terbentuk 31 (tiga puluh satu) kecamatan dan semuanya telah berbadan hukum.

Kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dinas:

a. Melakukan monitoring kepada Koperasi Toko Kelontong baik pada rusunawa, eks lokalisasi maupun Koperasi Toko Kelontong Kecamatan.
b. Melakukan pendampingan stok dan kas opname pada Koperasi Toko Kelontong yang telah terbentuk dan berjalan usahanya
c. Penyusunan pembuatan laporan bulanan dan pembinaan Perkoperasian pada Toko Kelontong.

II.2.2 Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Saat ini Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro telah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha mikro perkotaan dengan jumlah 727 orang yang berada di luar sentra, jika dikelompokan sesuai jenis produk yang dikelola sebagai berikut :

1. Handycraft sebanyak 114 orang
2. Fashion sebanyak 111 orang
3. Makanan dan Minuman sebanyak 455 orang
4. Lainnya sebanyak 47 orang

Intervensi yang diberikan kepada pelaku usaha mikro adalah pendampingan dan pelatihan manajemen usaha. Dari jumlah tersebut, lokasi tersebar di wilayah Surabaya seperti pada gambar 7.

Gambar 7
Persebaran Pelaku Usaha Mikro pada Sentra Wisata Kuliner (SWK)

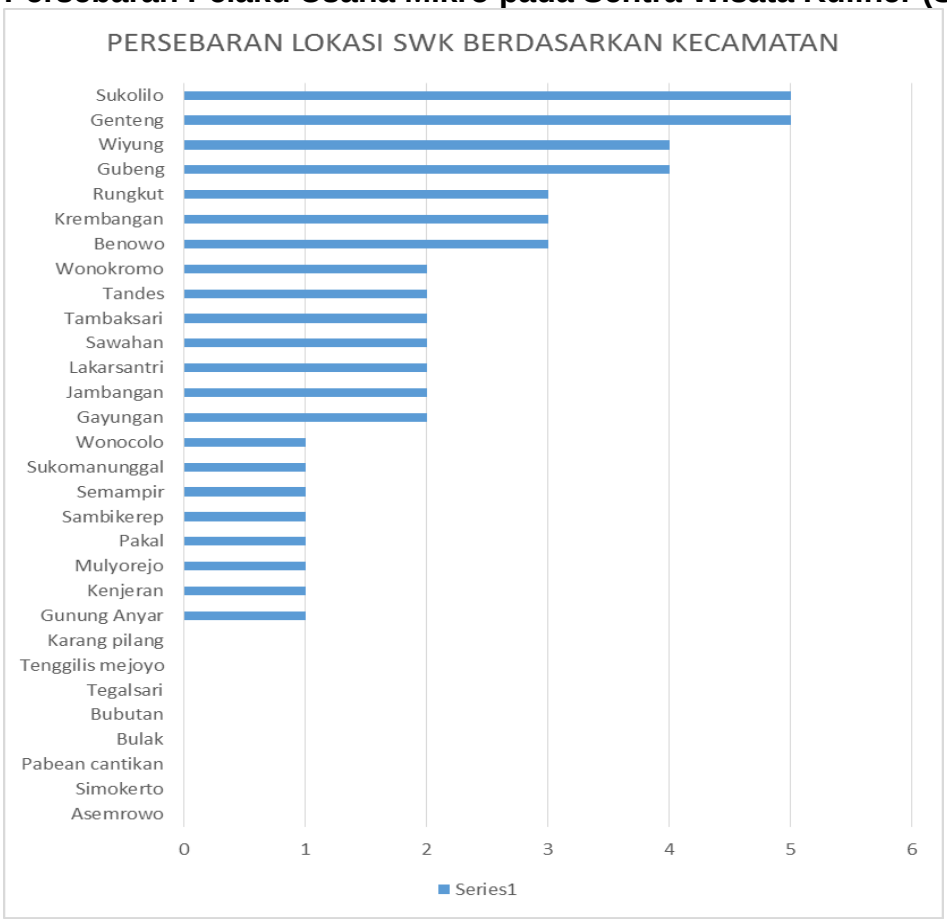

Pembinaan pelaku Usaha Mikro, juga dilakukan tersentral dengan lokasi tersebar di wilayah Kecamatan Kota Surabaya. Saat ini, di Surabaya terdapat 49 lokasi sentra atau tempat berkumpulnya para pedagang yang dulunya merupakan PKL di pinggir – pinggir jalan dengan menjual macam – macam makanan yang beragam. Lokasi / peta persebaran SWK di Kota Surabaya sebagaimana pada gambar 8.

Gambar 8
Peta persebaran SWK di Kota Surabaya

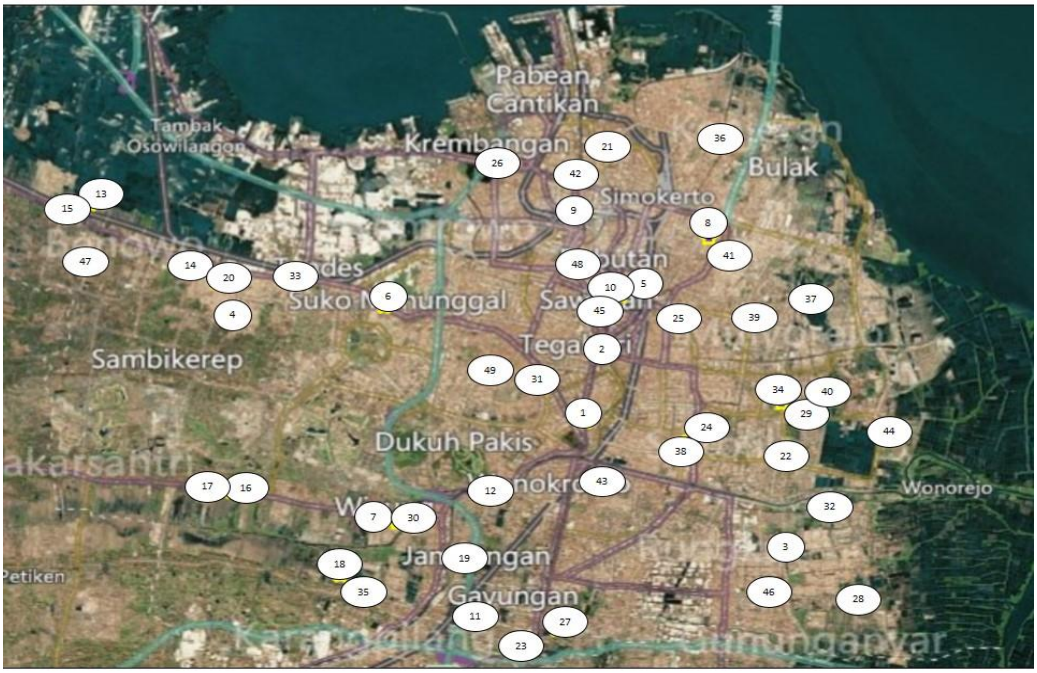

Pemerintah Kota berupaya terus membenahi Sentra Wisata Kuliner (SWK) yang ada di beberapa titik di Kota Surabaya. Dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan pedagang yang lebih baik dan sentra – sentra dapat menjadi destinasi wisata kuliner di Surabaya. Pembenahan itu mulai dari penerapan single cashier, pembenahan bangunan yang nyaman dan menarik, hingga pelatihan para pedagang oleh chef handal. Dengan sistem pembayaran *single cashier* ini, manajemen para pedagang dapat terbukukan, baik itu manajemen keuangan maupun produk-produk kuliner yang disajikan.

Tabel 2.2
Data Sentra Wisata Kuliner dan Single Casier

NO.	NAMA SWK	SINGLE CASIER	DI BANGUN TAHUN	ALAMAT	LOKASI		LUASAN SWK	KAPASITAS TEMPAT	JUMLAH PEDAGANG AKTIF
					KELURAHAN	KECAMATAN			
1	SWK TAMAN BUNGKUL	-	2008	Taman Bungkul	Darmo	Wonokromo	890 M2	51	49
2	SWK URIP SUMOHARJO	-	2008	Jl. Urip Sumoharjo No 24	Embong Kaliasin	Genteng	500 M2	30	23
3	SWK PENJARINGAN SARI	-	2009	Jl. Raya Pandugo	Penjaringansari	Rungkut	611.11 M2	26	27
4	SWK TERMINAL MANUKAN	-	2009	Jl. Candi Lontar	Lontar	Sambikerep	488 M2	26	23
5	SWK KETABANG KALI	-	2010	Jl. Inspeksi Ketabang Kali	Genteng	Genteng	569,30 M2	38	38
6	SWK SUKOMANUNGGAL	-	2010	Jl. Raya Sukomanunggal	Sukomanunggal	Sukomanunggal	387,60 M2	30	30
7	SWK WIYUNG	YA	2010	Jl. Menganti Wiyung	Wiyung	Wiyung	387,60 M2	22	21
8	SWK PUTRO AGUNG	-	2010	Jl. Alun-Alun Rangkah	Rangkah	Tambaksari	387,60 M2	35	34
9	SWK INDRAPURA	YA	2010	Jl. Bubutan 147 C/Indrapura	Krembangan Selatan	Krembangan	630 M2	34	21
10	SWK TAMAN PRESTASI	-	2010	Jl. Ketabang Kali	Ketabang	Genteng	630 M2	35	30
11	SWK GAYUNGAN	YA	2010	Jl. Masjid Agung Timur No. 2	Gayungan	Gayungan	945,75 M2	32	25
12	SWK KARAH	-	2011	Jl. Karah Kebon Agung No. 1	Karah	Jambangan	1092 M2	38	33
13	SWK SEMEMI	-	2011	Jl. Raya Sememi	Sememi	Benowo	232.5 M2	19	18
14	SWK KANDANGAN	-	2011	Jl. Raya Tengger	Kandangan	Benowo	500,17 M2	17	16
15	SWK BABAT JERAWAT	-	2011	Jl. Raya Babat Jerawat	Babat Jerawat	Pakal	1.412.00 m2	28	27
16	SWK LIDAH WETAN	-	2011	Jl. Raya Menganti	Lidah wetan	Lakarsantri	504 M2	18	15
17	SWK LIDAH KULON	-	2011	Jl. Raya Lidah Kulon No. 5	Lidah Kulon	Lakarsantri	430 M2	17	15
18	SWK PONDOK MARITIM	-	2012	Jl. Pondok Maritim	Balasklumprik	Wiyung	687,05 M2	34	9
19	SWK JAMBANGAN	-	2013	Jl. Raya Kebonsari Tengah	Jambangan	Jambangan	861.60 M2	29	24
20	SWK MANUKAN LOR	-	2013	Jl. Manukan Lor IV	Banjar Sugihan	Tandes	482.98 M2	31	14

NO.	NAMA SWK	SINGLE CASIER	DI BANGUN TAHUN	ALAMAT	LOKASI		LUASAN SWK	KAPASITAS TEMPAT	JUMLAH PEDAGANG AKTIF
					KELURAHAN	KECAMATAN			
21	SWK PEGIRIAN	-	2013	Jl. Pegirian	Ampel	Semampir	939,30 M2	128	106
22	SWK SEMOLOWARU	-	2013	Jl. Semolowaru	Semolowaru	Sukolilo	611.11 M2	35	24
23	SWK DUKUH MENANGGAL	-	2013	Jl. Dukuh Menanggal	Dukuh Menanggal	Gayungan	549.27 M2	31	12
24	SWK RMI KEBUN BIBIT	-	2013	Jl. Ngagel Jaya Selatan	Baratajaya	Gubeng	660 M2	68	53
25	SWK DHARMAWANGSA	-	2013	Jl. Raya Dharmawangsa	Airlangga	Gubeng	500 M2	26	25
26	SWK KREMBANGAN	-	2014	Jl. Masjid Agung Timur No. 2	Krembangan selatan	Krembangan	296,20 M2	24	23
27	SWK SIWALANKERTO	YA	2014	Jl. Siwalankerto	Siwalankerto	Wonocolo	470 m3	19	14
28	SWK GUNUNG ANYAR	-	2014	Jl. Gunung Anyar Sawah	Gunung Anyar	Gunung Anyar	510 M2	32	16
29	SWK DELES MERR	YA	2014	Jl. Arif Rahman Hakim	Klampis Ngasem	Sukolilo	890 M2	36	31
30	SWK JAJAR TUNGGAL	YA	2014	Jl. Raya Menganti	Jajar Tunggal	Wiyung	342 M2	18	16
31	SWK KEMBANG KUNING	-	2014	Jl. Kembang Kuning	Pakis	Sawahan	180 M2	21	16
32	SWK WONOREJO	-	2014	Jl. Kendal Sari	Wonorejo	Rungkut	350,75 M2	20	18
33	SWK TANDES	YA	2014	Komplek Perumnas Balongsari	Balongsari	Tandes	150 M2	19	16
34	SWK KLAMPIS NGASEM	YA	2014	Jl. Ir Sukarno	Klampis Ngasem	Sukolilo	387 M2	20	19
35	SWK BALAS KLUMPRIK	-	2015	Jl. Balas Klumprik	Balas Klumprik	Wiyung	560 m2	15	7
36	SWK TANAH MERAH	-	2015	Jl. Tanah Merah	Tanah Kali Kedinding	Kenjeran	538 M2	28	14
37	SWK MULYOREJO	-	2015	Jl. Sutorejo	Mulyorejo	Mulyorejo	624 M2	40	27
38	SWK BRATANG BINANGUN	-	2015	Jl. Bratang Binangun	Barata Jaya	Gubeng	2000 M2	52	46
39	SWK DHARMA HUSADA	YA	2015	Jl. Prof. Dr. Moestopo	Mojo	Gubeng	350 M2	21	36
40	SWK CONVENTION HALL	YA	2015	Jl. Arif Rahman Hakim	Klampis Ngasem	Sukolilo	890 M2	40	37
41	SWK KAPAS KRAMPUNG	-	2016	Jl. Karang Asem	Ploso	Tambaksari	148 M2	100	18
42	SWK KASUARI	-	2015	Jl. Kasuari	Krembangan Selatan	Krembangan	387,60 M2	20	19
43	SWK BENTUL	-	2018	Jl. Bentul	Jagir	Wonokromo	227.5 M2	20	20

NO.	NAMA SWK	SINGLE CASIER	DI BANGUN TAHUN	ALAMAT	LOKASI		LUASAN SWK	KAPASITAS TEMPAT	JUMLAH PEDAGANG AKTIF
					KELURAHAN	KECAMATAN			
44	SWK KEPUTIH	-	2015	Jl. Keputih timur	Keputih	sukolilo	500 M2	25	0
45	SWK KENDUNG	-	2019	JL. Raya Kendung	Sememi	Benowo	213.63 M2	9	7
46	SWK RUNGKUT KIDUL	-	2019	Jl. Rungkut Asri	Rungkut Kidul	Rungkut	248 M2	8	7
47	SWK SIOLA	-	2020	Jl. Tunjungan no 1-3	Genteng	Genteng	-	11	12
48	SWK EMBONG SAWO	YA	2018	Jl. Embong Sawo No 20	Embong Kaliasin	Genteng	220 M2	11	11
49	SWK STUDIO	-	2020	Jl. Jarak No. 20	Putat Jaya	Sawahan	481 M2	23	12

Sumber : Data bidang Usaha Mikro 2021 dan SIMBADA 2021

Gambar 9
Sistem Single Kasir pada SWK

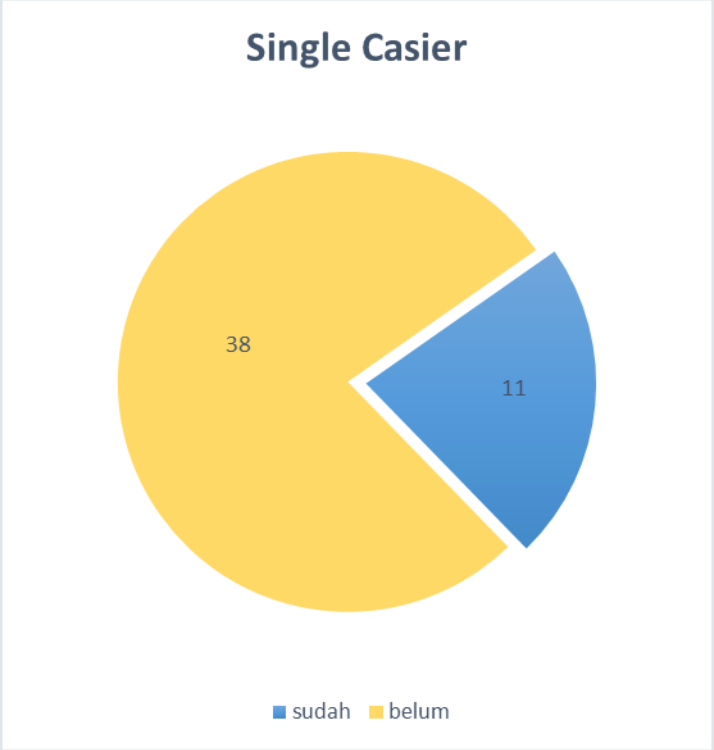

Melalui sistem pembayaran kasir tunggal ini diharapkan pengelolaan SWK di 49 lokasi di Surabaya terkesan modern dan manajemen para pedagang bisa tertata lebih baik dengan begitu maka bisa diketahui jenis makanan atau minuman apa saja yang disukai pembeli atau konsumennya, dan perkembangan setiap penjual yang ada di Sentra Wisata Kuliner, sehingga kedepan akan lebih memudahkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melakukan pemantauan, monitoring maupun evaluasi. Intervensi yang sudah diberikan untuk Sentra Wisata Kuliner yakni (i) Pelatihan peningkatan kualitas mutu pedagang SWK, (ii) Pendampingan ke pedagang SWK, (iii) Fasilitasi Pemasaran dengan pembuatan media foto untuk promosi, dan (iv) Penyediaan sarana dan prasarana. Tabel 2.3 merupakan daftar SWK dan penerapan Single Casier yang menjadi binaan Dinas.

Proporsi Sumber Permodalan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi & UKM Nomor 04/Per/Dep.1/III/2018 Tentang Kriteria dan Indikator Penilian Pemeringkatan. Pelaku usaha mikro binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang mendapatkan bantuan permodalan sebanyak 30% atau 175 dari 587 pelaku usaha binaan. Bantuan permodalan didapatkan dari beberapa perusahaan antara lain : KUR BRI, PT Telkom, Bank BTPN Syariah, Bank BRI, Koperasi Juragan Sukses Surabaya, PT. Jasa Marga, PT. Semen Gresik, Pertamina, KOPWAN, PT. Pegadaian, Bank Mandiri, Bank JATIM, PT. Pelindo III dan PNPM.

Gambar 10
Permodalan Kemitraan Pelaku Usaha Mikro

Proporsi sektor usaha koperasi terdapat pada Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi & UKM Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi & UKM Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang

Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Koperasi simpan pinjam & unit simpan pinjam koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada sektor riil.

Adanya pandemi covid-19 sangat berpengaruh terhadap segala bidang. Dampak negatif pandemi juga sangat dirasakan oleh UMKM yaitu mengalami penurunan omzet yang sangat signifikan. Sebelum pandemi datang omzet UKM binaan mempunyai trend yang naik. Untuk membantu pelaku usaha agar dapat bertahan di tengah pandemi, Dinas memperluas intervensi dengan menggandeng lebih banyak pelaku usaha mikro yang terdampak kondisi pandemi. Pada Tahun 2021, Dinas telah membina sebanyak 1.439 pelaku usaha mikro. Sebanyak 1.439 pelaku Usaha Mikro telah meningkat aksesibilitas pemasaran produknya.

Upaya yang dilakukan dalam Peningkatan Aksesibilitas Pemasaran Produk lebih didukung oleh pola pemasaran yang semula *offline* menjadi *online*. Peningkatan kesadaran para pelaku usaha yang mulai menyentuh strategi digital marketing, khususnya dimasa pandemi dimana pelaku usaha dituntut untuk mengoptimalkan pemasaran secara online karena pemberlakukan Social Distancing dan pembatasan sosial berskala besar. Tercapaianya target prosentase usaha mikro binaan yang mendapatkan fasilitasi pemasaran usaha produk dikarenakan adanya kegiatan fasilitasi pemasaran yang diluar perencanaan termasuk adanya kerjasama pembinaan usaha mikro dengan pihak ketiga, sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah usaha mikro yang terfasilitasi. Salah satu kerjasama yang dilakukan yaitu dengan menyelenggarakan pameran virtual.

Selain melakukan pembinaan, Dinas juga memasarkan produk UKM di Sentra dan Stand UKM yang dikelola Dinas. Perkembangan Sentra dan Stand UKM yang dikelola oleh Dinas sebayak 15 (lima belas) lokasi berikut ini :

Tabel 2.3
Sentra dan Stand UKM

No	Nama Sentra/Stand Usaha	Alamat Sentra/Stand Usaha	Kelurahan dan Kecamatan	Luas Sentra/Stand Usaha (m2)
1	Sentra UKM Tunjungan City	Jl. Tunjungan No. 1-3 (Lantai1) Surabaya	Genteng	25 X 15 Meter
2	Sentra UKM MERR	Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.11, Medokan Semampir, Sukolilo, Surabaya	Sukolilo	589 M2
3	Stand UKM Lapangan Parkir Wisata Religi Ampel	Jalan Pegirian (sebelah PD Rumah Potong Hewan)	Semampir	10 X 2,5 Meter
4	Stand UKM Park and Ride	Jl. Mayjen Sungkono No.122 (Lt. 2), Gunung Sari, Dukuh Pakis, Surabaya	Dukuh Pakis	7 X 5 Meter
5	Stand UKM RS BDH	Jl. Kendung No. 115 - 117 (Lt. Dasar), Sememi, Benowo, Surabaya	Benowo	2,5 X 2,5 Meter
6	Stand UKM Terminal Joyoboyo	Jl. Joyoboyo No. 1 (Lt. 3), Surabaya	Wonokromo	5 X 2,5 Meter
7	Stand UKM KBS Surabaya	Jl. Setail No.1, Darmo, Wonokromo, Surabaya	Wonokromo	9 X 9 Meter
8	Stand UKM Mangrove Information Center (MIC)	Kompleks Wisata Hutan Mangrove Jl. Raya Wonorejo No.1, Wonorejo Kec. Rungkut, Surabaya	Wonorejo	3 X 3 Meter
9	Stand UKM Sentra Ikan Bulak (SIB)	Jl. Sukolilo VII No. 24 (Lt. 2) Kedung Cowek, Kec. Bulak, Surabaya	Bulak	3 X 3 Meter
10	Stand UKM UPTSA Surabaya Timur	Jl. Raya Menur No. 31C, Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Surabaya	Mulyorejo	2,5 X 1,5 Meter
11	Stand UKM Lapangan Parkir Arief Rahman Hakim	Jl. Arief Rachman Hakim No.100, Klampis Ngasem, Sukolilo, Surabaya	Sukolilo	2,5 X 4 Meter
12	Stand UKM Terminal Purabaya	Posko Suroboyo Bus Terminal Purabaya Jl. Letjen Sutoyo Bungurasih, Waru - Kab.Sidoarjo	Waru	2,5 X 2,5 Meter

No	Nama Sentra/Stand Usaha	Alamat Sentra/Stand Usaha	Kelurahan dan Kecamatan	Luas Sentra/Stand Usaha (m2)
13	Sentra Batik	Jl. Putat Jaya Barat VIII B No.31, Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota SBY, Jawa Timur 60255	Sawahan	170 M2
14	Sentra Sepatu dan Slipper	Jl.Kupang Gn. Tim. I No.20-22, Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota SBY, Jawa Timur 60255 (ex Wisma Barbara)	Sawahan	293 M2
15	Sentra Jahit	Jl. Bukit Barisan No.12 Surabaya	Sawahan	30 X 15 Meter

III.2.3. Bidang Pembinaan Usaha Perdagangan

Salah satu tugas dari Bidang Pembinaan Usaha Perdagangan adalah pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya sebagaimana program yang diampu. Perizinan/Non Perizinan/rekomendasi yang menjadi kewenangan Bidang Pembinaan Usaha Perdagangan dalam penerbitan antara lain :

1. Ijin Usaha Toko Swalayan (IUTS);
2. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol (SIUP-MB);
3. Ijin Usaha Pemberdayaan Pasar Rakyat (IUP2R);
4. Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
5. Persetujuan Pameran Dagang, Konvensi dan Seminar Dagang;
6. Tanda Daftar Gudang (TDG);
7. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
8. Rekomendasi Bahan Berbahaya (B2).

Berikut ini adalah data penerbitan perizinan pada tahun 2021 .

Gambar 11
Data Jumlah Perijinan yang diterbitkan

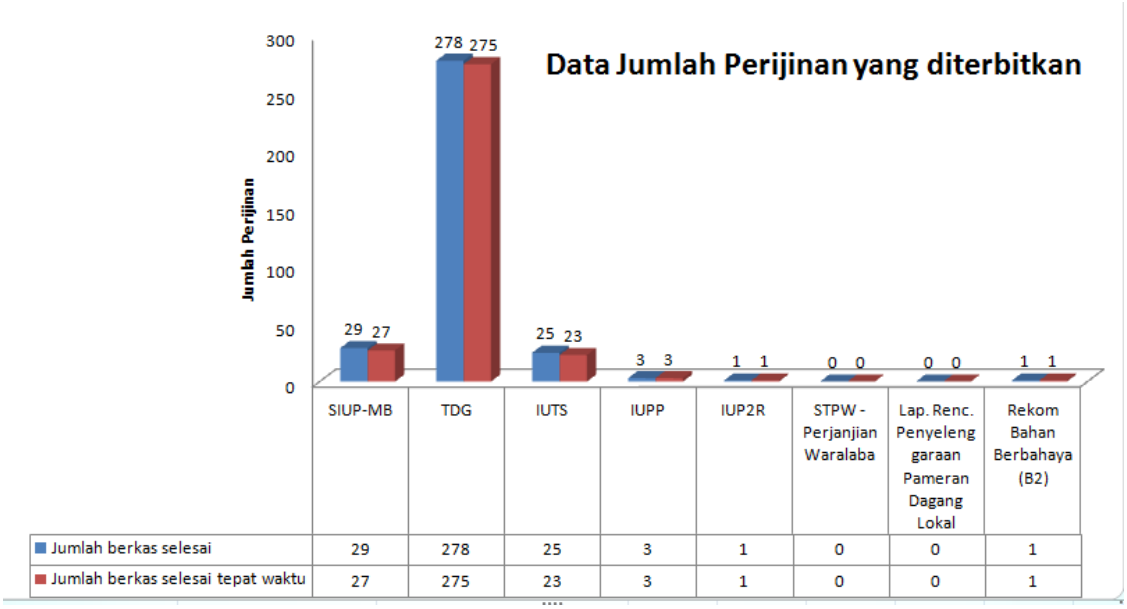

Bidang Pembinaan Usaha Perdagangan juga menjalankan tugas dalam melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kota, pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota, pembinaan dan pengawasan izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan skala lokal. Berikut ini adalah data usaha bidang perdagangan yang diawasi perizinannya yang terdiri atas TDG dan SIUP-MB sebagaimana Gambar 12 :

Gambar 12

Data Jumlah Usaha di bidang perdagangan yang diawasi perizinannya

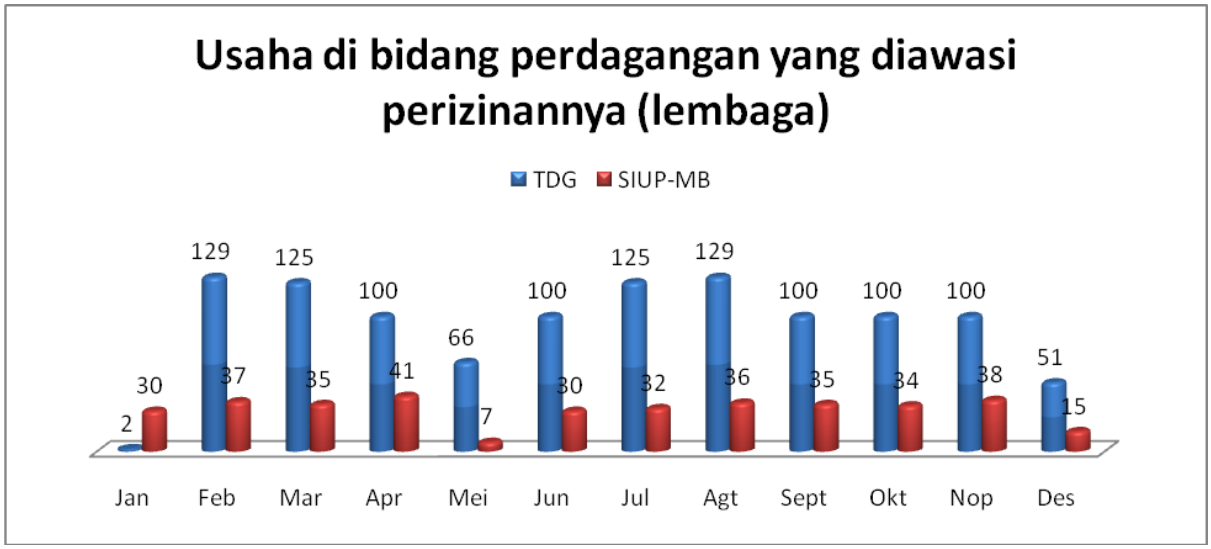

Surabaya sebagai Kota Perdagangan dan Jasa serta Kota Penghubung Wilayah Indonesia Bagian Timur sehingga roda perekonomian di Kota Surabaya sangat dipangaruhi oleh aktivitas perdagangan dan jasa. Dalam rangka upaya pengamanan perdagangan terutama untuk upaya perlindungan konsumen, melalui UPTD Metrologi Legal menyelenggarakan pelayanan tera/tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP). Kegiatan Metrologi Legal mempunyai sasaran untuk memberikan jaminan ketepatan pengukuran, penakaran, dan penimbangan produk yang dikonsumsi langsung oleh konsumen. Pelaksanaan kegiatan metrologi legal dibagi menjadi 3 (tiga) baik itu di tempat pemilik UTTP atau disebut dengan Loko, kantor UPTD Metrologi Legal (sidang kantor), di Pasar Tradisional maupun Modern (sidang pasar), serta Kecamatan di wilayah Kota Surabaya. Berikut ini adalah data Jumlah Alat UTTP yang telah dilayani oleh UPTD Metrologi Legal :

Gambar 13

Data Jumlah Alat UTTP yang dilayani

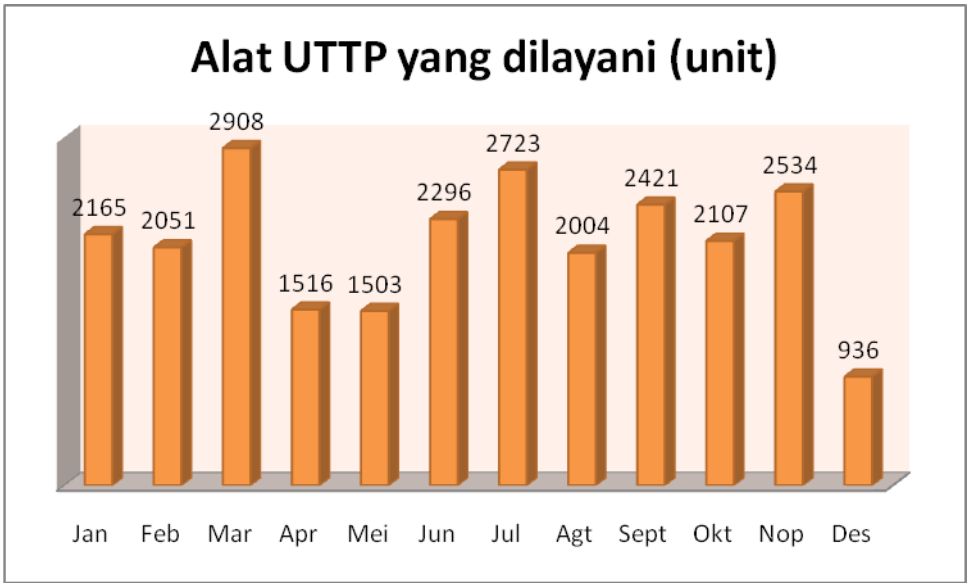

Adapun Ruang lingkup pelayanan Tera/Tera Ulang UPTD Metrologi Legal adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Ruang Lingkup Pelayanan Tera/Tera Ulang UPTD Metrologi Legal

PELAYANAN TERA/TERA ULANG	NO	UTTP
Alat Ukur Panjang	1	Alat Ukur Tinggi
	2	Meter dengan Pegangan
	3	Meter Kayu
	4	Meter Taksi
	5	Ban Ukur
	6	Depth Tape
Alat Ukur Cairan Dinamis	7	Pompa Ukur BBM
	8	Pompa Ukur Gas
	9	Meter Air (Non Barindo)
	10	Meter Air (Barindo)
	11	Meter Arus
Timbangan Bukan Otomatis	12	Timbangan Elektronik
	13	Timbangan Pegas
	14	Timbangan Cepat

PELAYANAN TERA/TERA ULANG	NO	UTTP
	15	Neraca
	16	Dacin
	17	Timbangan Milisimal
	18	Timbangan Sentisimal
	19	Timbangan Desimal
	20	Timbangan Bobot Ingsut
	21	Timbangan Meja
	22	Timbangan Jembatan
Timbangan Otomatis	23	Timbangan Ban Berjalan
	24	Timbangan Pengisian
	25	Timbangan Pengecek dan Penyortir
Anak Timbangan	26	Anak Timbangan
Meter Kwh	27	Meter Kwh
Alat Ukur Volume	28	Takaran Basah dan Takaran Kering
	29	Tangki Ukur Mobil (TUM)
	30	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak (TUTSIT)
	31	Meter Kadar Air

III.2.4. Bidang Distribusi Perdagangan

Salah satu tugas yang diamanatkan pada Bidang Distribusi Perdagangan adalah melaksanakan monitoring harga dan ketersedian Barang pokok di pasar rakyat dan toko modern, pelaksanaan Operasi Pasar dan Pasar Murah serta Sidak Pasar dalam Satgas Pangan dengan tujuan utama adalah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan penting di Kota Surabaya dengan melakukan tindakan preventif maupun antisipatif apabila terjadi gejolak harga barang kebutuhan pokok dan penting.

Stabilitas harga dapat diketahui per komoditas pangan berdasarkan perhitungan harga pangan yang terdapat di Kota Surabaya. Harga bahan pangan di

Kota Surabaya dapat diamati perhari, perbulan dan pertahun. Harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan kurang dari 5%. Gejolak harga dilihat dari besarnya koefisien variasi (CV) dari komoditas pangan.

Tingkat stabilitas harga berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten Kota. Target Koefisien keragaman Kota Surabaya ditentukan berdasarkan perkiraan inflasi, yaitu sebesar 5%. Dengan adanya target tersebut maka target tingkat stabilitas harga komoditas pangan di Kota Surabaya sesuai dengan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.5
Tingkat Stabilitas Harga s/d Bulan Desember 2021

No.	Nama Bahan Pokok	Jenis	Satuan	Harga rata-rata	Standar Deviasi	Koefisien Variasi (CV)	Target Kota	Tingkat Stabilisasi Harga
1	Beras	- Beras IR.64 Kwalitas I **(HET : 12.800)**	Kg	12,310.16	286.11	2.32%	5%	153.5%
		- Beras IR.64 Kwalitas II	Kg	10,839.65	291.15	2.69%	5%	146.3%
		- Beras IR.64 Kwalitas III **(HET : 9.450)**	Kg	8,874.20	772.92	8.71%	5%	25.8%
2	Gula	Gula Pasir Lokal Curah **(HET : 12.500)**	Kg	12,080.62	311.75	2.58%	5%	148.4%
3	Minyak Goreng	- Minyak Goreng Curah (Bening) **(HET : 11.000)**	Kg	15,113.77	1,616.59	10.70%	5%	-13.9%
4	Daging	- Daging Sapi Grade Atas **(HET : 105.000)**	Kg	116,287.43	3,652.03	3.14%	5%	137.2%
		- Daging Sapi Grade Sedang **(HET : 80.000)**	Kg	106,884.95	3,142.36	2.94%	5%	141.2%

No.	Nama Bahan Pokok	Jenis	Satuan	Harga rata-rata	Standar Deviasi	Koefisien Variasi (CV)	Target Kota	Tingkat Stabilisasi Harga
		- Daging Sapi Grade Bawah **(HET : 80.000)**	Kg	97,859.30	3,190.75	3.26%	5%	134.8%
		- Daging Ayam Broiler **(HET : 35.000)**	Kg	31,920.45	2,561.32	8.02%	5%	39.5%
5	Telur	- Telur Ayam Broiler **(HET : 24.000)**	Kg	21,430.93	2,055.34	9.59%	5%	8.2%
6	GAS LPG	- Gas LPG Tabung (3 Kg.) **(HET : 16.000)**	Per Tabung	17,919.16	486.51	2.72%	5%	145.7%
Rata-rata Tingkat Stabilisasi Harga Sampai Dengan Desember 2021								**97.0%**

Hasil pencapaian indikator Tingkat stabilitas harga komoditas tersebut didukung oleh koordinasi dengan stakeholder/OPD/Instansi terkait dalam penyediaan komoditas (yang sedang bergejolak) untuk kemudian dilakukan Operasi Pasar/Pasar Murah. Disamping itu adanya pemantauan harga secara rutin dan juga kerjasama dengan stakeholder (distributor) yang baik sehingga sangat mendukung Pemerintah Kota melakukan intervensi yang dapat menjaga tingkat stabilitas harga khususnya Bapokting. Melalui perhitungan dan analisa perkembangan harian harga komoditas pada 5 (lima) pasar di Kota Surabaya yang diperoleh dari PD. Pasar Surya, sesuai formulasi perhitung koefisiean keragaman, selama tahun 2021 telah terjadi kejadian gejolak harga dengan frekuensi intervensi Operasi Pasar Murah sebagaimana resume kejadian gejolak harga dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.6

Frekuensi intervensi ketersediaan komoditas pada tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV

Komoditas yang Mengalami Kejadian Gejolak Harga	Fluktuasi Harga (%)	Periode Pengamatan Kejadian	Frekuensi Pelaksanaan Intervensi	Jumlah Kejadian Gejolak Harga	Lama/periode Gejolak Harga
Cabai rawit, cabai kriting, cabai besar dan kedelai	8,05% - 5,67% - 14,63% (9,45%) dan 4,19%	1 s/d 13 Januari 2021 dan 1 s/d 10 Januari 2021	73	1	14 hari
Daging Ayam Ras	5,20% / 5,55%	1 s/d 14 April 2021	57	1	15 hari
Cabai Rawit	6,41%	12 s/d 19 Juni 2021	15	1	8 hari
Minyak Goreng	5,67%	1 Agustus s/d 29 Oktober 2021	96	1	122 hari
Cabai rawit, cabai kriting, cabai besar	15,09% - 9,47% - 21,15%	1 s/d 30 Nopember 2021	33	1	30 hari

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran seperti yang terdapat dalam Renja Dinas, masih menghadapi kendala antara lain :

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) para pengelola Koperasi dan Usaha Mikro baik tingkat pendidikan, pengetahuannya dan kompetensinya
2. Banyak KSP yang belum melaksanakan aturan simpan pinjam sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku
3. Masih banyak Koperasi dan Usaha Mikro yang masih belum bisa mengakses sumber daya produktif
4. Masih terbatasnya sistem, produksi dan pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro
5. Peningkatan koordinasi dan sinergi pemangku kepentingan Koperasi dan Usaha Mikro dalam meningkatan dan menguatkan kualitas kelembagaan, manajemen dan system pemasaran

6. Digitalisasi informasi dan komunikasi yang masih belum dipahami sepenuhnya oleh pelaku usaha mikro.

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan NSPK, SPM maupun IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dengan jenis indikator yang dikaji sesuai dengan tolak ukur dan indikator pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta sesuai dengan tugas fungsi, bersama ini disampaikan capaian kinerja pelayanan perangkat daerah :

Tabel 2.7 (T-C30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator (Nama Program Kegiatan)	SPM / Standar Nasional	IKK (Program / Kegiatan)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
2	Penunjang Urusan Pemerintahan										
2,2	Unsur Manajemen										
02.02.02	Non Pelayanan Dasar										
2.2.2.01	Sarana dan Prasarana Perkantoran										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
2.2.2.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** Administrasi Umum Perangkat Daerah (2022-2023)			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	**87,00%**	**88,00%**	**87%**	***87 %***	**89,87%**	**104,47%**	**87%**	***87 %***
2.2.2.01.01.0023	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2022 - 2023)		*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketersediaan anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN	**-**	**-**	100%	100%	**-**	**-**	100%	100%
2.2.2.01.02	**Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan**										
			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	**100,00%**	**100,00%**	-	-	**100,00%**	**-**	-	-
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	**100,00%**	**100,00%**	-	-	**100,00%**	**100%**	-	-
2.2.2.0	Pemeliharaan dan Pengadaan		*Persentase pemeliharaan*	100%	-	100 %	100 %	100%	-	100 %	100 %

No	Indikator (Nama Program Kegiatan)	SPM / Standar Nasional	IKK (Program / Kegiatan)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.02.0023	Sarana Perkantoran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (2022 – 2023)		*dan pengadaan sarana perkantoran*								
1	Urusan Pemerintahan										
1,1	Wajib										
01.01.02	Non Pelayanan Dasar										
1.1.2.15	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah										
1.1.2.15.02	**Program Pengembangan Produk Usaha Mikro**										
			Persentase pelaku usaha mikro yang produknya layak diujimutukan	**35,11%**	**40,00%**	**-**	**-**	**36,12%**	**75,65%**	-	-
1.1.2.15.02.0002	Pembinaan Pelaku Usaha Mikro		*Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pembinaan*	587 orang	858 orang	-	-	587 orang	867 orang	-	-
1.1.2.15.03	**Program Pengembangan Sentra Usaha**										
			Persentase sentra usaha makanan dan minuman yang beroperasi secara optimal	**58,00%**	**63,00%**	**-**	**-**	**69,39%**	**115,74%**	-	-
1.1.2.15.03.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan di Sentra Usaha		Jumlah sentra usaha yang difasilitasi	21 sentra usaha	60 sentra usaha	-	-	23 sentra usaha	59 sentra usaha	-	-
1.1.2.15.03.0003	Pembinaan Pelaku Usaha di Sentra Usaha		Jumlah sentra usaha yang pelaku usahanya mendapatkan pembinaan	49 sentra usaha	49 sentra usaha	-	-	49 sentra usaha	49 sentra usaha	-	-
1.1.2.15.04	**Program Pengembangan Usaha Koperasi**										
			Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya	**55,00%**	**80,00%**	**-**	**-**	**55,61%**	**64,96%**	**-**	**-**
1.1.2.15.04.0001	FasilitasiPeningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi		Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan	100 koperasi	175 koperasi	-	-	100 koperasi	45 koperasi	-	-

No	Indikator (Nama Program Kegiatan)	SPM / Standar Nasional	IKK (Program / Kegiatan)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
			mengembangkan usaha bisnis								
1.1.2.15.04.0003	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK)		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan UKM	210 Orang	-	-	-	210 Orang	-	-	-
1.1.2.15.05	**Program Penguatan Kelembagaan Koperasi**										
			Persentase koperasi berklasifikasi AAB	**69,95%**	**72,95%**	-	-	**72,18%**	**100,03%**	-	-
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian (2022 – 2023)		**Prosentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.**	**-**	**-**	**14%**	**29%**	**-**	**-**	**14%**	**29%**
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pengurus/pengelola yang mendapat pendidikan dan pelatihan	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi (2022 – 2023)		**Persentase jumlah koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)**	**-**	**-**	**69%**	**70%**	**-**	**-**	**69%**	**70%**
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	-	-	415 koperasi	415 koperasi	-	-	415 koperasi	415 koperasi
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam (2022 – 2023)		***Persentase koperasi yang telah memiliki izin usaha simpan pinjam***	**-**	**-**	**20%**	**28%**	**-**	**-**	**20%**	**28%**
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi	-	-	33 koperasi	34 koperasi	-	-	33 koperasi	34 koperasi

No	Indikator (Nama Program Kegiatan)	SPM / Standar Nasional	IKK (Program / Kegiatan)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.1.2.15.05.0001	Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi		*Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi pembentukan dan peningkatan kualitas koperasi*	44 kelompok	50 kelompok	-	-	44 kelompok	50 kelompok	-	-
1.1.2.15.05.0002	Pengawasan Koperasi		Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	629 koperasi	629 koperasi	-	-	629 koperasi	629 koperasi	-	-
1.1.2.15.05.0003	Penilaian Kinerja Koperasi		Jumlah koperasi yang dinilai kinerjanya	35 koperasi	35 koperasi	-	-	35 koperasi	35 koperasi	-	-
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi (2022 – 2023)										
			Prosentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	**-**	**-**	**20%**	**40%**	**-**	**-**	**20%**	**40%**
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		jumlah koperasi yang difaslitasi untuk meningkatkan usaha koperasi	-	-	83 koperasi	83 koperasi	-	-	83 koperasi	83 koperasi
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) (2022 – 2023)										
			Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	**-**	**-**	**69%**	**100%**	**-**	**-**	**83 koperasi**	**83 koperasi**
			prosentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha	**-**	**-**	**9.97%**	**19,95 %**	**-**	**-**	**9.97%**	**19,95 %**
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang		Jumlah pelaku usaha	-	-	135 orang	135 orang	-	-	135 orang	135 orang

No	Indikator (Nama Program Kegiatan)	SPM / Standar Nasional	IKK (Program / Kegiatan)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (2022 – 2023)		mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan								
			Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikro nya mendapatkan pembinaan	-	-	10 sentra	10 sentra	-	-	10 sentra	10 sentra
	Program Pengembangan UMKM (2022 – 2023)										
			Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya	**-**	**-**	**52%**	**64%**	**-**	**-**	**52%**	**64%**
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil		Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha	-	-	500 pelaku usaha mikro (orang)	500 pelaku usaha mikro (orang)	-	-	500 pelaku usaha mikro (orang)	500 pelaku usaha mikro (orang)
1.1.2.15.06	**Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro (2022 – 2023)**										
			Persentase pelaku usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan	**8,31%**	**8,50%**	-	-	**8,97%**	**107,53%**	-	-
1.1.2.15.06.0001	Fasilitasi Kemitraan dan Pengembangan Usaha Mikro		*Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan*	173 orang/kelompok	175 orang/kelompok	-	-	173 orang/kelompok	175 orang/kelompok	-	-
1	Urusan Pemerintahan										
1.1	Wajib										
1.1.2	Non Pelayanan Dasar										
1.1.2.15	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah										
1.1.2.15.01	**Program Pemasaran Produk Usaha Mikro**		*Persentase usaha mikro binaan yang mendapatkan*	**90.00%**				**100.00%**			

No	Indikator (Nama Program Kegiatan)	SPM / Standar Nasional	IKK (Program / Kegiatan)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
			fasilitasi pemasaran produk								
1.1.2.15.01.0001	Fasilitasi Pemasaran Usaha Mikro		*Jumlah UKM Yang Terfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro*	**330 Orang**				**480 Orang**			
1.1.2.15.01.0003	Pengelolaan Sentra dan Stand Usaha Mikro		*Jumlah sentra dan Stand Usaha Mikro yang dikelola*	**12 lokasi**				**12 lokasi**			
1.1.2.15.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pembinaan UKM (DAK)		*Jumlah sarana dan prasarana penunjang pembinaan UKM yang disediakan*	**11 Jenis**				**7 Jenis**			
1.2	Pilihan										
1.2.2	Non Pelayanan Dasar										
1.2.2.03	Perdagangan										
1.2.2.03.01	**Program Distribusi Perdagangan**		*Frekuensi fasilitasi pelaku distribusi perdagangan*	**17.00kali**				**20.00kali**			
			Frekuensi intervensi ketersediaan komoditas	**31.00kali per kejadian**				**45.00kali per kejadian**			
			Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar	**80.00%**				**83.50%**			
1.2.2.03.01.0001	Monitoring Kelengkapan Data Gudang Terdaftar		*Jumlah gudang yang dimonitor*	**250 lokasi**				**475 lokasi**			
1.2.2.03.01.0002	Pembinaan terhadap pelaku distribusi perdagangan		*Jumlah Pelaku Distribusi Perdagangan yang dibina*	**31 Kelompok**				**31 Kelompok**			
1.2.2.03.01.0003	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		*Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan*	**200 kali**				**307 kali**			
1.2.2.03.02	**Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Perdagangan**		*Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup perdagangan*	**78.00%**				**93.41%**			
1.2.2.0	Pelayanan Perijinan di Bidang		*Jumlah ijin bidang*	**350 berkas**				**591 berkas**			

No	Indikator (Nama Program Kegiatan)	SPM / Standar Nasional	IKK (Program / Kegiatan)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
3.02.00 01	Perdagangan		*perdagangan yang diterbitkan*								
1.2.2.0 3.02.00 02	Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan		*Jumlah usaha di bidang perdagangan yang diawasi perijinannya*	**1552 Lembaga**				**1608 Lembaga**			
1.2.2.0 3.03	**Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**		*Persentase temuan yang ditindaklanjuti*	**85.00%**				**100.00%**			
1.2.2.0 3.03.00 01	Operasional UPTD Metrologi legal		*Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi Legal yang dipelihara dan disediakan*	**16 Jenis**				**16 Jenis**			
1.2.2.0 3.03.00 02	Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)		*Jumlah alat UTTP yang dilayani*	**20879 unit**				**21560 unit**			
1.2.2.0 3.03.00 03	Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)		*Jumlah alat UTTP yang diawasi*	**4500 unit**				**4716 unit**			
2	Penunjang Urusan Pemerintahan										
2.2	Unsur Manajemen										
2.2.2	Non Pelayanan Dasar										
2.2.2.0 1	Sarana dan Prasarana Perkantoran										
2.2.2.0 1.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		*Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran*	**87.00%**							
								86.07%			
2.2.2.0 1.01.00 31	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah		*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	**100%**				**100%**			
2.2.2.0 1.02	**Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan**		*Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran*	**100.00%**							
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	**100.00%**				**100.00%**			

No	Indikator (Nama Program Kegiatan)	SPM / Standar Nasional	IKK (Program / Kegiatan)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
								100.00%			
2.2.2.01.02.0031	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran		*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	**100%**				**100%**			
3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**										
3.3	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**										
3.30.02	**Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan**		**Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup perdagangan**		80%	92%	93%		97,9%	92%	93%
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		*Jumlah ijin bidang perdagangan yang diterbitkan*		340 Berkas	450 Berkas	450 Berkas		284 Berkas	450 Berkas	450 Berkas
3.30.02.2.05.01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		*Jumlah usaha di bidang perdagangan yang diawasi perijinannya*		352 Lembaga	380 Lembaga	380 Lembaga		283 Lembaga	380 Lembaga	380 Lembaga
3.30.02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik		*Jumlah ijin bidang perdagangan yang diterbitkan*		55 Berkas	55 Berkas	55 Berkas		41 Berkas	55 Berkas	55 Berkas
3.30.02.2.04.02	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri		*Jumlah ijin bidang perdagangan yang diterbitkan*		5 Berkas	24 Berkas	24 Berkas		4 Berkas	24 Berkas	24 Berkas
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		*Jumlah usaha di bidang perdagangan yang diawasi perijinannya*		1200 Lembaga	450 lembaga	450 lembaga		976 Lembaga	450 lembaga	450 lembaga
	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya		Jumlah lokasi penyimpanan bahan berbahaya yang diperiksa			20 lokasi	20 lokasi			20 lokasi	20 lokasi
3.30.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi**		88%				90,86%		

No	Indikator (Nama Program Kegiatan)	SPM / Standar Nasional	IKK (Program / Kegiatan)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
			perkantoran								
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik		100%	100%	100%		100%	100%	100%
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*		100%	100%	100%		100.00%	100%	100%
3.30.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*		100%	100%	100%		73,68%	100%	
3.30.04	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**		**Frekuensi intervensi ketersediaan komoditas**		31kali per kejadian				47,33kali per kejadian		
			Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar		85%				82,91%		
			Persentase intervensi ketersediaan komoditas			100%	100%			100%	100%
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		*Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan*		205 Kali	217 Kali	217 Kali		175 Kali	217 Kali	217 Kali
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		*Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan*		12 Kali	12 Kali	12 Kali		9 Kali	12 Kali	12 Kali
3.30.06	**Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen**		**Persentase temuan yang ditindaklanjuti**		90%				100%		
			Persentase pelayanan tera yang tepat waktu			100%	100%			100%	100%
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang		*Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi Legal yang dipelihara dan disediakan*		16 Jenis				16 Jenis		
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang		*Jumlah alat UTTP yang dilayani*		24570 Unit	22.430 unit	22.880 unit		19580 Unit	22.430 unit	22.880 unit
3.30.06	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi		*Jumlah alat UTTP yang*		4500 Unit	4.750 unit	4.750 unit		3740 Unit	4.750 unit	4.750 unit

No	Indikator (Nama Program Kegiatan)	SPM / Standar Nasional	IKK (Program / Kegiatan)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
.2.01.02	Legal		*diawasi*								
3.30.03	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**		**Frekuensi fasilitasi pelaku distribusi perdagangan**		17kali				19kali		
			Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi			100%	100%		100%	100%	100%
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		*Jumlah Pelaku Distribusi Perdagangan yang dibina*		31 Kelompok	500 pelaku usaha sarana distribusi perdagangan	500 pelaku usaha sarana distribusi perdagangan		31 Kelompok	500 pelaku usaha sarana distribusi perdagangan	500 pelaku usaha sarana distribusi perdagangan
			Jumlah pasar yang dikelola			12 lokasi	12 lokasi			12 lokasi	12 lokasi
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		*Jumlah gudang yang dimonitor*		300 Lokasi				359 Lokasi		

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

II.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memperhatikan tingkat capaian program dan kegiatan Dinas pada tahun dapat diambil kesimpulan kinerja Perangkat Daerah sangat baik. Perumusan kegiatan dan perubahan-perubahan pada kegiatan tetap mempertimbangkan konsistensi rencana kegiatan di tahun-tahun sebelumnya. Beberapa hal yang perlu di perhatikan dan sifatnya penting antara lain aktivitas pengendalian atau monitoring yang termasuk dalam tahapan proses penyusunan dokumen atau pelaksanaan kegiatan, seperti pencapaian output kegiatan serta ketepatan jenis output yang dihasilkan.

II.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Penentuan Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi,kinerja pelayanan Dinas serta tantangan ekternal baik dari lokal yang bersifat kedaerahan maupun nasional bahkan internasional. Mengingat Kota Surabaya merupakan Kota Jasa dan Perdagangan terbesar kedua di Indonesia. Isu strategis merupakan kondisi keadaan saat ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Adapun permasalahan dan hambatan yang dijumpai adalah :

1. Masih banyaknya koperasi yang belum melaksanakan RAT karena kondisi pandemi Covid-19
2. Ketatnya persaingan dunia usaha baik mikro, kecil dan menengah yang menuntut jiwa kewirausahaan yang inovatif dan berdaya saing
3. Fasilitasi akses sumber daya produktif bagi koperasi dan pelaku usaha mikro belum optimal

4. Penambahan dan persebaran PKL yang cukup tinggi khususnya yang berada di sekitar lokasi SWK
5. Kondisi pandemi Covid-19 mempengaruhi dan menyebabkan beberapa lokasi SWK tidak dapat berfungsi secara optimal.
6. Kurangnya informasi terkait produsen komoditas untuk pemenuhan bahan pokok
7. Fluktuasi harga pangan yang tidak dapat diprediksi
8. Masih adanya UMKM yang belum dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya

II.3.3 Dampak Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap capaian Program

Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Daerah, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana fungsi dan kedudukan RPJMD adalah menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sesuai dengan Visi Kota Kota Surabaya "Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan" dan **Misi** kesatu ***"Mewujudkan Perekonomian Inklusif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Dan Pembukaan Lapangan Kerja Baru Melalui Penguatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Kondusifitas Iklim Investasi, Penguatan Daya Saing Surabaya Sebagai Pusat Penghubung Perdagangan Dan Jasa Antar Pulau Serta Internasional"*** dan Tema Arah Kebijakan Kota

Surabaya dalam RKPD 2023 yakni ***" Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemenuhan kebutuhan Sosial Dasar berkelanjutan".***

II.3.4 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah dan perdagangan disebabkan faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut :

FAKTOR INTERNAL	FAKTOR EKSTERNAL
KEKUATAN / STRENGTHS (S)	**PELUANG / OPPRTUNITIES (O)**
1. Kewenangan untuk pengawasan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro 2. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi untuk mendukung kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro antara lain SIM – KUM, ekobis, e-lokal market, media sosial koperasi dan usaha mikro dll. 3. SOP disetiap kegiatan 4. Ketersediaan fasilitas berusaha bagi pelaku usaha mikro seperti SWK, Pasar dan Sentra UKM 5. Ketersediaan Dasar Hukum, Peraturan dan Pedoman tentang Perkoperasian dan Usaha Mikro 6. Tersedianya institusi kelembagaan daerah (SOTK) dan kewenangan 7. Jumlah SDM dan tenaga ahli kemetrologian yang memadai dengan latar belakangi berbagai disiplin ilmu dan sebagian besar Sarjana (S1) dan SMA. 8. Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana yang mendukung (Teknolgi Komunikasi dan Informasi serta fasilitas tempat berusaha bagi pelaku usaha mikro) 9. Adanya dukungan APBD Kota Surabaya dalam penyelenggaraan kegiatan	1. Pertumbuhan jumlah koperasi 2. Legalitas dan peluang usaha koperasi 3. Tingginya animo masyarakat untuk berkoperasi dan berwirausaha 4. Muncul dan tumbuhnya usaha kreatif 5. Pertumbuhan pangsa pasar regional, nasional dan internasional 6. Kerjasama stakeholder eksternal kepada pelaku usaha mikro 7. Kemampuan daya saing dan semangat kewirausahaan pelaku usaha mikro 8. Adanya kebijakan pemerintah daerah dan pusat yang konsisten mendukung perkembangan perdagangan, melalui kemudahan perizinan. 9. Semakin meningkatnya masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan 10. Kemajuan teknologi internet bagi jangkauan pemasaran dan promosi perdagangan (online) seiring dengan perkembangan platform ekonomi digital yang masif 11. Pembangunan infrastruktur jalan pulau Jawa secara pesat memiliki dampak ekonomi besar, antara lain dalam peningkatan perdagangan dan pergudangan serta peningkatan ekonomi kreatif dan pengembangan usaha miko

FAKTOR INTERNAL	FAKTOR EKSTERNAL
KELEMAHAN / WEAKNESS (W)	**ANCAMAN / THREATS (T)**
1. Kualitas dan kuantitas SDM pembina perkoperasian dan usaha mikro 2. Rendahnya mekanisme penegakan sanksi, terhadap Koperasi dan Usaha Mikro 3. Kurangnya sarana prasarana pendukung operasional 4. Belum adanya rencana induk pengembangan koperasi dan usaha mikro 5. Beberapa lokasi fasilitas berusaha bagi pelaku usaha mikro seperti SWK, Pasar dan Sentra UKM yang kurang strategis 6. Belum tersedianya data demografi tentang Pelaku Usaha Mikro di Kota Surabaya 7. Terbatasnya kewenangan Dinas terhadap indikator dan target yang berkaitan dengan tingkat ketersediaan pangan 8. Kualitas Sumber Daya Manusia belum merata (SDM Pegawai) dikarenakan masih minimnya disiplin ilmu yang dimiliki sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan teknis 9. Koordinasi dan Sinkronisasi Program belum berjalan dengan baik. 10. Belum tertatanya Sistem Informasi yang baik 11. Terbatasnya kewenangan Dinas terhadap indikator dan target yang berkaitan dengan tingkat ketersediaan pangan 12. Masih adanya UMKM yang belum dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	1. Peningkatan jumlah koperasi selain KSP dan koperasi sekunder yang kurang produktif 2. Kualitas SDM di koperasi (anggota, pengurus, pengawas) dan usaha mikro 3. Meningkatnya persaingan usaha sebagai dampak perkembangan teknologi komunikasi dan informasi 4. Penambahan dan persebaran Pedagang Kaki Lima (PKL) khusunya yang berada disekitar lokasi SWK 5. Meningkatnya produk impor dengan harga yang lebih murah 6. Beredarnya produk impor yang belum memiliki standar dan mulai berdirinya minimarket waralaba yang dimiliki perorangan/swasta 7. Sistem informasi dan fluktuasi harga barang pokok dan penting lainnya 8. Keterbatasan akses permodalan pelaku usaha kecil 9. Kesadaran pelaku usaha untuk tertib serta kepatuhan terhadap peraturan

Dari berbagai permasalahan baik faktor penghambat maupun pendorong, dan dari hasil identifikasi pada Rencana Strategis Dinas, maka ditetapkan beberapa isu strategis sebagai berikut :

a. Terbatasnya akses permodalan dan pemasaran koperasi dan usaha mikro
b. Pesatnya pertumbuhan pangsa pasar regional, nasional dan internasional
c. Penambahan dan persebaran Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya yang berada di sekitar lokasi Sentra Wisata Kuliner (SWK).

d. Peningkatan pengembangan informasi peluang pasar dan jaringan pemasaran
e. Mekanisme pengendalian distibusi barang dan stabilitas ketersediaan barang pokok dan penting
f. Optimalisasi pelayanan tera/tera ulang dalam rangka upaya perlindungan konsumen

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kota Surabaya. Penyusunan Renja memperhatikan sinkronisasi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, juga menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan daerah.:

Tabel 3.1
Keterkaitan Prioritas Nasional Dan Tugas Dan Fungsi PD

No	Prioritas Nasional	Prioritas PD	Bidang Pada Dinas
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Bidang Koperasi
		Pemberdayaan Usaha Mikro, Pengembangan Produk Usaha Mikro, Pembinaandan Pengembangan Sentra Usaha	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
		Perkuatan Permodalan Usaha Mikro, Perizinan Berusaha	Bidang Pembinaan Usaha Perdagangan
		Pengendalian ketersediaan dan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Bidang Distribusi Perdagangan

Keterkaitan antara prioritas nasional dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya menunjukkan adanya hubungan untuk koperasi usaha kecil dan menengah dan perdagangan, terutama dalam pemberdayaan dan pengembangan sehingga kedepan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya berupaya untuk lebih meningkatkan Produktivitas Koperasi dan Usaha Mikro serta meningkatkan pertumbuhan PDRB (kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor) dan peningkatan arus barang melalui tanjung perak melalui program dan kegiatan secara lebih terarah.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indicator *outcome* yang terukur. Dalam perumusan sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja sasaran yang akan diukur. Berdasarkan analisa permasalahan dan isu strategis serta Hasil Pembahasan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program serta RenstraTahun 2021-2026, telah dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022. Tujuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya yaitu "**Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal**", dengan indikator kinerja:

a. Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
b. Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak
c. Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro

Sedangkan untuk Sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya tahun 2022 sebagai berikut :

1. Menjaga Stabilitas Distribusi Barang
2. Memperluas jangkauan pemasaran produk usaha mikro
3. Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan
4. Optimalisasi Kepatuhan Pemakaian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
5. Meningkatnya Produktivitas Koperasi
6. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
7. Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV.1. Program dan kegiatan

A. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program danKegiatan

Dalam upaya mencapai program dan kegiatan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya juga melihat faktor pertimbangan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dimana dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kota yang dijabarkan dalam sasaran PD adalah kesinambungan yang diimplementasikan kedalam program dan kegiatan. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Perumusan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan tahun 2022 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota SurabayaTahun 2022.
2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota SurabayaTahun 2022.
3. Prioritas pengembangan sistem Perkoperasian dan Usaha Mikro dan Perdagangan yang diwujudkan dalam kegiatan.

Selain hal tersebut diatas yang menjadi rumusan program kegiatan juga meliputi :

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
2. Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro;
3. Pencapaian NSPK ;
4. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

B. Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya tahun 2022 disusun mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021 – 2026. Pada Tahun 2022 direncanakan ada 12 (dua belas) program dan 21 (kegiatan) kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah :

Tabel 4.1 (Tabel T-C 33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan		89%	33,439,544,626			90%	Rp 37.703.131.159
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				27,395,110,638				
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN		100 %	27,395,110,638			100 %	Rp 31.696.765.430
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6,044,433,988				
2.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		100 %	935,259,607			100 %	Rp 936.440.247
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran		100 %	5,109,174,381			100 %	Rp 5.069.925.482
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam		15%	442,600,291			23%	Rp 601.834.835

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				442,600,291				
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi guna memperoleh izin usaha simpan pinjam		30 koperasi	442,600,291			30 koperasi	Rp 601.834.835
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)		67%	750,496,301			68%	Rp 880.868.152
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				750,496,301				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pemeriksaan guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan		415 koperasi	750,496,301			415 koperasi	Rp 880.868.152
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.		14%	404,200,000			29%	Rp 505.865.717
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				404,200,000				
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus/pengelola yang mendapat pendidikan dan pelatihan		179 orang	404,200,000			179 orang	Rp 505.865.717
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha		20%	393,865,153			40%	Rp 483.710.779

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				393,865,153				
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek pengembangan unit usaha		83 koperasi	393,865,153			83 koperasi	Rp 483.710.779
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha		9.97%	4,280,057,058			19,95 %	Rp 2.741.223.966
		Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya		69%				100%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				4,280,057,058				
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan		135 orang	259,246,839			136 orang	Rp 325.691.418
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikro nya mendapatkan fasilitasi pendampingan peningkatan kualitas produk		10 sentra	4,020,810,219			10 sentra	Rp 2.415.532.548
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya		52%	1,171,794,186			64%	Rp 1.332.831.865
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil				1,171,794,186				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pelatihan dan pendampingan manajemen usaha		500 orang	1,171,794,186			500 orang	Rp 1.332.831.865
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase ketepatan waktu pelayanan			1,005,200,323			93%	Rp 1.525.825.582
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan				259,582,216				
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang difasilitasi			259,582,216			450 pelaku usaha	Rp 434.445.145
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang				184,536,424				
3.30.02.2	Fasilitasi Penerbitan Tanda	Jumlah gudang yang			184,536,424			450 Pel	Rp 383.606.

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.02.01	Daftar Gudang	difasilitasi						aku usaha	588
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri				100,748,419				
3.30.02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah usaha waralaba dalam negeri yang difasilitasi			100,748,419			55 Pelaku usaha	Rp 113.318.106
3.30.02.2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri				49,846,528				
3.30.02.2.04.01	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah usaha waralaba luar negeri yang difasilitasi			49,846,528			24 Pelaku Usaha	Rp 113.318.106

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat				295,938,316				
3.30.02.2.05.01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang difasilitasi			295,938,316			380 Pelaku usaha	Rp 466.395.962
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				114,548,420				
3.30.02.2.06.01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah lokasi penyimpanan bahan berbahaya yang diperiksa			114,548,420			20 lokasi	Rp 128.059.781
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi		100 %	3,154,372,598			100%	Rp 4.696.317.428
3.30.03.2.02	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di				3,154,372,598				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wilayah Kerjanya								
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dikelola		12 lokasi	3,154,372,598			12 lokasi	Rp 4.696.317.428
		Jumlah Pelaku Usaha Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina		500 pelaku usaha sarana distribusi perdagangan				500 pelaku usaha sarana distribusi perdagangan	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase intervensi ketersediaan komoditas		100 %	812,252,131			100%	Rp 1.145.387.183
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				812,252,131				
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Frekuensi Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		12 kali	568,173,372			12 kali	Rp 770.791.069

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus		217 kali	244,078,759			217 kali	Rp 374.596.114
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pelayanan tera yang tepat waktu		100 %	1,126,579,910			100%	Rp 1.758.551.753
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				1,126,579,910				
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang		22.430 Unit	1,013,187,891			22.880 Unit	Rp 1.628.646.253
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah alat UTTP yang diawasi		4.750 unit	113,392,019			4.750 unit	Rp 129.905.500
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran		100 %	4,931,042,620			100%	Rp 5.887.875.757
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				4,931,042,620				
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan	Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitasi			4,931,042,620			5.220 orang	Rp 5.887.875.757

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	pemasaran							
					51,912,005,197				Rp 59.376.742.282

C. Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2022 disusun mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD KotaSurabaya Tahun 2021-2026.